

**OPINI MASYARAKAT KELURAHAN TAMBANGAN
HULU TERHADAP CALON TUNGGAL WALIKOTA
TEBING TINGGI 2017**

SKRIPSI

Oleh:

REZA SYAHPUTRA

NPM: 1303110198

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KONSENTRASI HUMAS**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : **REZA SYAHPUTRA**
N P M : 1303100198
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **OPINI MASYARAKAT KELURAHAN TAMBANGAN HULU TERHADAP CALON TUNGGAL WALIKOTA TEBING TINGGI 2017**

Medan, 17 Oktober 2018

Pembimbing I


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom


Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **REZA SYAHPUTRA**

N P M : 1303110198

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari, tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018

W a k t u : 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. YAN HENDRA, M.Si**

PENGUJI II : **AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom**

PENGUJI III : **Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, REZA SYAHPUTRA, NPM 1303110198, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 15 Oktober 2018
Yang menyatakan,



REZA SYAHPUTRA



Cerdas & Terpercaya

Wab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Reza Syahputra
NPM : 1303110190
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Opini Masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu Terhadap Calon Tunggal Wahkan Tebing Tinggi 2017

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	20-12-2017	Bimbingan Proposal Skripsi	
	23-12-2017	Bimbingan Proposal Skripsi revisi II	
	5-01-2018	Acc Proposal Skripsi	
	17-09-2018	Bimbingan Abstrak	
	25-09-2018	Bimbingan Bab IV	
	28-09-2018	Bimbingan Bab IV Revisi II	
	04-10-2018	Bimbingan Bab V	
	11-10-2018	Acc Skripsi	

Medan, 13 Oktober 2018

Dekan,

Dr. Arifin Saleh S.Sos M.S.P

Ketua Program Studi,

(NURHASANAH NASTIJON M.I.Kn)

Pembimbing ke : ...

(ZULFAHMI Drs. M.S)

ABSTRAK

OPINI MASYARAKAT KELURAHAN TAMBANGAN HULU TERHADAP CALON TUNGGAL WALIKOTA TEBING TINGGI 2017

Oleh

REZA SYAHPUTRA
NPM 1303110198

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan, Pasangan Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar merupakan calon tunggal di kota Tebing Tinggi, Sumut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat kelurahan Tambangan Hulu terhadap calon tunggal walikota Tebing Tinggi 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana opini masyarakat tentang calon tunggal walikota Tebing Tinggi pasangan Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar tersebut. Peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data yang di perlukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Pasangan tunggal walikota Tebing Tinggi merupakan tokoh masyarakat yang telah di kenal oleh masyarakat kota Tebing Tinggi, begitu juga dengan masyarakat di kelurahan Tambangan Hulu. Para masyarakat pada umumnya menilai bahwa pasangan tersebut pantas dan layak untuk menjadi walikota Tebing Tinggi

Kata kunci: Pilkada, Calon Tunggal, Komunikasi Politik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat beriring salam penulis berikan risalah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang.

Penulis menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Opini Masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu Terhadap Calon Tunggal Walikota Tebing Tinggi 2017”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha, bantuan dari berbagai pihak yang akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Sahirwan dan Ibunda Rosmawar Daulay, serta kepada Abangda Ryan Syahputra, Marwan Syahputra dan adik Irma Suryani, yang telah memberikan dorongan, semangat, serta cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulfahmi Ibnu, selaku Wakil Dekan I Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos. M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ahyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Zulfahmi Ibnu, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, kesempatan dan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff BIRO Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah membantu dalam menyelesaikan segala berkas administrasi yang dibutuhkan selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan, Onie Arifin Your, Aulia Nugraha, Indra syahputra, Khairul Abdi dan masih banyak lagi yang selalu bersama menunggu dosen bimbingannya masing-masing.

11. Reza Novlizal, Fikri Aljuas, Arif MZ, Andre syahputra, Ilham Surbakti, Nining Andini, Vanni Shavira yang telah memberikan semangat dan dorongan serta bersedia direpotkan dalam masa pengerjaan skripsi hingga selesai pada waktunya.

12. Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2013, khususnya kelas IKO-A Sore dan Humas malam.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah, penulisan skripsi ini penulis buat agar bermanfaat bagi semua, penulis mengucapkan terimakasih.

Wasalammu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Medan , Oktober 2018

Penulis

REZA SYAHPUTRA

NPM : 1303110198

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah anda mengikuti perkembangan informasi atau berita kampanye dalam pilkada 15 februari 2017 Tebing Tinggi dengan Calon tunggal ?
2. Apakah anda mengikuti (memberikan suara/melakukan percobaan) pada pilkada tersebut ?
3. Apakah anda mengetahui bahwa pada Pilkada Tebing Tinggi tersebut hanya diikuti oleh calon tunggal ? jika mengetahui darimana mendapatkan informasinya ?
4. Apakah anda memperhatikan informasi tentang Kampanye pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni ?
5. Apakah anda mengenal/mengetahui pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni sebagai calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Tebing Tinggi ?
6. Apakah anda mengetahui visi dan misi atau program yang dijanjikan oleh pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni ?
7. Jika mengetahui, apakah anda bisa menyebutkan program yang dijanjikan oleh pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni ?
8. Apakah anda mendapat atribut kampanye dari pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni ?
9. Citra apa yang menurut anda sesuai dengan pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni ?
10. Apakah cara-cara kampanye yang dilakukan oleh Umar Zunaidi dan Oki Doni tersebut mempengaruhi anda untuk memilih mereka ?

11. Apa alasan anda memilih pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni ? jika tidak memilih (tidak mencoblos) bisa diutarakan alasannya ?
12. Menurut anda seperti apakah pemimpin yang baik itu ?
13. Menurut anda pasangan Umar Zunaidi dan Oki Doni sudah dapat disebut pemimpin yang baik ?
14. Menurut harapan anda kriteria pemimpin yang bagaimana untuk memimpin Kota Tebing Tinggi selanjutnya ?

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABLE	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
A. Komunikasi.....	6
B. Komunikasi Politik	10
C. Demokrasi	18
D. Demokrasi Pancasila di Indonesia	22
E. Pemilihan Umum	26
F. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	28
G. Pengertian Kepala Daerah	31
H. Pemerintahan Daerah	33
I. Tinjauan tentang Partisipasi	35
J. Proses Pemilihan Kepala Daerah	40

K. Profil Walikota dan Wakil Walikota	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Metode Penelitian	47
C. Informan dan Narasumber	47
D. Kerangka Konsep.....	48
E. Definisi Konsep	48
F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
B. Penyajian Data	53
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131).

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama didalamnya adalah terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis seperti Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu selama dua kali, pertama adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, dan kedua adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang duduk

sebagai eksekutif. Mekanisme semacam ini juga berlaku hingga di tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sejak Indonesia merdeka sebelum tahun 2005 hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum.

Pasangan Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar merupakan calon tunggal di Kota Tebingtinggi, Sumut. Hampir bisa dipastikan, pasangan itu akan memimpin kembali Kota Tebingtinggi untuk lima tahun ke depan (2017-2022).

Sebagai calon tunggal, mereka meraih 41.957 suara (71,42%) di lima kecamatan yang ada di Kota Tebingtinggi. Sedangkan yang memilih kotak kosong (tidak memilih Umar-Oki) sebanyak 16.887 suara. (sistem informasi kecamatan <http://kecamatan.e-kotatebingtinggi.com/rambutan?href=news&read=pilkada-tebing-tinggi-calon-tunggal-catat-kemenangan>)

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat partisipasi masyarakat sebesar 58% dari jumlah DPT 106.940 pemilih. Pasangan incumbent ini meraih 9.886 suara di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Bajenis 8.392 suara, Kecamatan Padang Hulu 8.345 suara, Kecamatan Padang Hilir 8.594 dan Kecamatan Tebingtinggi Kota 6.740 suara, dengan total perolehan suara, 41.957.

Sedangkan yang memilih kotak kosong mencapai 16.887, dengan rincian Kecamatan Rambutan 3.540, Kecamatan Bajenis 3.979, Kecamatan Padang Hilir 3.938, Kecamatan Padang Hulu 2.890 dan Kecamatan Tebingtinggi Kota 2.540. Surat suara sah, Kecamatan Rambutan 13.426, Kecamatan Bajenis 12.368, Kecamatan Padang Hilir 12.532, Kecamatan Padang Hulu 12.575 dan Tebingtinggi Kota 9.280.

Berdasarkan fenomena Pilkada dan calon tunggal yang terjadi di Tebing Tinggi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul: **OPINI MASYARAKAT KELURAHAN TAMBANGAN HULU TERHADAP CALON TUNGGAL WALIKOTA TEBING TINGGI 2017**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membuat perumusan masalah untuk membantu peneliti menentukan pembahasan dan mencegah penelitian tidak berkembang terlalu luas. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah opini masyarakat kelurahan Tambangan Hulu terhadap calon tunggal walikota Tebing Tinggi 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui opini masyarakat kelurahan Tambangan Hulu terhadap calon tunggal walikota tebing tinggi 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan potensi penelitian di kalangan FISIP UMSU (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang komunikasi politik.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan bagi banyak pihak untuk mengetahui opini masyarakat kelurahan Tambangan Hulu terhadap calon tunggal walikota tebing tinggi 2017

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan pembatasan masalah.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang relevan tentang Komunikasi, Komunikasi Politik, Pengertian Pemilu, Pilkada

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian, metodologi penelitian serta analisis data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengolahan data

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan peneliti

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia (Efendy, 2003:8). Ada banyak pengertian yang dapat menggambarkan mengenai komunikasi, berikut ini adalah beberapa diantaranya. Awalnya, istilah komunikasi mengandung makna “bersama-sama” (*common, communes*) yang berasal dari bahasa Inggris. Asal istilah komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio*, yang berarti pemberitahuan, pemberi bagian (dalam sesuatu), pertukaran dimana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarannya; untuk ikut ambil bagian (Liliweri, 1991:1). Adapun menurut Cherry, Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari bahasa latin *Communico* yang artinya membagi (Cangara, 2006:18). Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan; yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka maupuntidak langsung, melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, ataupun perilaku (Effendy, 2003:60).

Banyak ahli mendefinisikan komunikasi dalam berbagai sudut pandang yang macam- macam, dan menyebutkan bahwa ilmu komunikasi sebagai ilmu yang ekklisitis yaitu ilmu yang merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Pada dasarnya komunikasi adalah sebagai proses pernyataan antara manusia, yang dapat berupa pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (bahasa) baik verbal maupun non verbal sebagai alat penyalurnya. Pengertian komunikasi dikemukakan para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah Siapa yang mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa (*who says what in which channel to whom with what effect*) (Purba, 2007 :30)
2. Menurut Carl I.Hovland, komunikasi adalah proses dimana seseorang individu mengoperkan perangsang untuk mengubah tingkah laku individu-individu yang lain.
3. Menurut Rogers bersama D Lawrence Kincaid, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Cangara, 2006:19).
4. Menurut Barnlund Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidak pastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.

Dari beberapa definisi yang telah diberikan oleh para ahli tersebut pada dasarnya komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pikiran dan perasaan

dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang, kata - kata dan simbol - simbol untuk tujuan merubah sikap atau tingkah laku orang lain.

Menurut Effendy (2003 : 11) komunikasi di bagi menjadi dua tahap yaitu :

1. Proses komunikasi dalam perspektif psikologi, yaitu proses komunikasi prespektif yang terjadi didalam diri komunikator dan komunikan. Proses membungkus pikiran dengan bahasa yang dilakukan komunikator, yang dinamakan dengan *encoding* , akan ia transmisikan kepada komunikan. Selanjutnya terjadi proses komunikasi interpersonal dalam diri komunikan, yang disebut *decoding*, untuk memaknai pesan yang disampaikan kepadanya.
2. Proses komunikasi dalam prespektif mekanistik. Untuk jelasnya proses komunikasi dalam perspektif mekanistik dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa, yaitu :
 - a. Proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan sese orang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang umum yang dipergunakan sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah lambang verbal (bahasa). Namun dalam kondisi komunikasi tertentu, lambang-lambang yang dipergunakan dapat berupa *gesture*, yakni gerak anggota tubuh, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.

- b. Proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses komunikasi secara sekunder menggunakan media yang menyebarkan pesannya yang bersifat informatif yang digolongkan sebagai media massa (*mass media*) dan media nirmassa (media non-massa).
- c. Proses komunikasi secara linier, merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linier ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka (*face to face communication*) secara pribadi (*interpersonal communication*) dan kelompok (*group communication*), maupun dalam situasi bermedia (*mediated communication*).
- d. Proses komunikasi secara sirkular, merupakan lawan dari proses komunikasi secara linier. Dalam konteks komunikasi yang dimaksudkan proses komunikasi secara linier. Dalam konteks komunikasi yang dimaksudkan proses secara sirkuler adalah terjadinya *feedback* atau umpan balik, yaitu terjadinya arus respons atau tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang diberikan oleh komunikator.

Menurut Wahyudin dkk, teori dan model komunikasi pada tahun awal sekitar dekade 1940-an dan 1950-an, menjadi dasar menentukan komponen/bagian/ unsur yang mendasari kegiatan komunikasi Model yang

terkenal pada saat itu adalah model Harold Lasswell, seorang *American Political Scientist*. Model Komunikasi dari Harold Lasswell ini dianggap oleh para pakar komunikasi sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi (1948).

Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan Lasswell itu merupakan unsur-unsur atau komponen proses komunikasi, yaitu: *Sender/communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media*, *Receiver* (Komunikasi/Penerima), *Effect* (Efek).

Adapun fungsi komunikasi menurut Lasswell adalah sebagai berikut:

1. *The surveillance of the environment*; pengamatan lingkungan
2. *The correlation of the parts of society in responding to the environment*; korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan
3. *The transmission of the social heritage from one generation to the next*; transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

B. Komunikasi Politik

Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo (2000:8) mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal

orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.

Bagi Lasswell (dalam Varma, 2005:258), ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan David Easton dalam Sumarno (2009:8), mendefinisikan politik sebagai berikut:

“Political as a process those developmental processes through which person acquire political orientation and patterns of behavior”

Dalam definisi ini David Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku.

Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan sebagai berikut: Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Astrid, S. Soesanto, 2000:2).

Mengenai komunikasi politik ini (*political communication*) Kantaprawira (2003:25) memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi,

asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (*policy*) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Dilihat dari tujuan politik "*an sich*", maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.

Lasswell (dalam Varma, 2005:258) memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Dalam hal ini, R.S. Sigel (dalam Sumarno, 2009:10) memberikan pandangan sebagai berikut:

“Political socialization refers to the learning process, by which the political norms and behavior acceptable to an ongoing political system are transmitted from generation to generation.”

Dari batasan Sigel ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik bukan hanya menitikberatkan pada penerimaan norma-norma politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang berlangsung, tapi juga bagaimana merwariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi kenegaraan berikutnya.

1. Komunikator politik

Menurut Nimmo (2000:28), salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah komunikator politik. Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidak-tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat.

Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran komunikator politik dalam proses opini, Leonard W. Dood dalam Nimmo (2000:30) menyarankan jenis-jenis hal yang patut diketahui mengenai mereka: ”Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai

manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan nada pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi.

Berdasar pada anjuran Doob, jelas bahwa komunikator atau para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk keperluan ini Nimmo (2000:30) mengidentifikasi tiga kategori politikus, yaitu yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (part time)

2. Politikus sebagai komunikator Politik

Kelompok pertama ini adalah orang yang bercita-cita untuk memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah yang harus berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek aspek utama dalam kegiatan ini. Meskipun politikus melayani beraneka tujuan dengan berkomunikasi, ada dua hal yang menonjol. Daniel Katz (dalam Nimmo, 2000:30) menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian.

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan melindungi

tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator politik mengenai masalah yang lingkungannya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal.

3. Profesional sebagai komunikator politik

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta-merta media khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan (Nimmo, 2002:33).

Seorang komunikator profesional, menurut James Carey (dalam Nimmo, 2000:33) adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas

bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama.

Bagaimanapun, karena menjadi komunikator profesional, bukan politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan dirinya terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis politik.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2005:8) Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh orang yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh tindakan yang di arahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang politik dan ia adalah kegiatan yang dibedakan meskipun tidak selalu berhasil dari kegiatan yang lain.

Politik adalah pembicaraan atau lebih tepat, kegiatan politik adalah berbicara menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik dan bukan hanya kondisinya, bahwa kegiatan berkomunikasi antar orang-orang. Dari transaksi yang kita sebut transaksi politik itu muncul makna perselisihan sosial dan penyesuaiannya dan dalam proses itu tercipta konflik-konflik baru.

Pesan politik menyangkut pembicaraan dan aneka informasi politik tentang kekuasaan, pengaruhnya dalam masyarakat, otoritas yang dimiliki dan

konflik politik dalam persaingan yang melibatkan masyarakat, lembaga politik, pemerintah dan entitas lain yang bergerak dalam kegiatan politik.

Pembicaraan politik menurut Eko (2014:20) merupakan kegiatan simbolik yang dihubungkan dengan (1) lambang, (2) bahasa dan (3) opini publik. Ketiga faktor itu selalu melekat pada pesan-pesan politik yang disebarkan oleh komunikator politik kepada masyarakat dalam upaya untuk mencapai tujuan politik.

Komunikasi politik merupakan faktor yang esensial sebagai salah satu pendukung pembangunan. Semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan elite lainnya dalam kekuasaan negara, tidak bisa lepas dari komunikasi politik. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua individu, kelompok maupun entitas lain dalam kehidupan bernegara peduli terhadap pola komunikasi yang dilakukan di suatu komunitas. Terlebih lagi di lingkungan warga pedesaan, secara historis pola komunikasi politik yang sering dilakukan oleh para elit berkuasa justru bersifat koersif. Akibatnya, ada jarak yang menganga antara para pembuat kebijakan dengan masyarakat pedesaan. Satu sisi memaksakan kehendaknya, dipihak lain terperangkap dalam jerat ketidakberdayaan untuk melakukan penolakan terhadap jargon pembangunan yang serba memaksa.

Komunikasi politik yang dimaksud dalam hal ini adalah semua hal yang dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan balik isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat. Isu politik ini dilihat dalam prespektif yang sangat luas dan sangat

terkait dengan usaha partai politik untuk memposisikan dirinya dan membangun identitas.

C. Demokrasi

Gagasan mengenai demokrasi berawal dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenal kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan proses mayoritas.

Miriam Budiarto (2003:53) berpendapat bahwa gagasan demokrasi boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600-1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat feodal. Budiarto (2003:54) menjelaskan perkembangan demokrasi yang terpenting pada abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215). Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris. Piagam ini dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Perkembangan lainnya di Eropa Barat, menurut Miriam Budiarto (2003:54-55), yaitu adanya Renaissance yang merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno

yang selama dalam abad pertengahan telah disisihkan. Berawal dari hal tersebut timbulah gagasan mengenai adanya kebebasan beragama serta perlu adanya garis pemisah antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya masalah pemerintahan.

Masih menurut Budiarto (2003:55-56), menjelaskan bahwa penentangan terhadap monarki absolut didasarkan pada mata teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai *social contract* (kontak sosial). Pada hakekatnya kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolute dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf yang mencetuskan gagasan ini adalah John Locke, bahwa hak-hak politik menurutnya yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak mempunyai milik. Sedangkan

Montesque mencoba menyusun suatu system yang dapat menjamin hak-hak politik, yang dikenal dengan nama Trias Politica. Akibat dari pergolakan tersebut diatas, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan system politik. Demokrasi dalam bentuknya sekarang ini dimulai sejak munculnya revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi pada tahun 1879. Bertolak dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan tersebut terlihat munculnya ide pemerintahan rakyat atau demokrasi.

Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratin* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dapat diartikan bahwa pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi berdasarkan penyaluran atas kehendak rakyat ada dua macam yaitu:

1. Demokrasi Langsung, adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-Undang.
2. Demokrasi Tidak Langsung, adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Pengertian demokrasi berdasarkan sudut termilogis menurut Harris Soche, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat dan orang yang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah.

Sedangkan ciri demokratisasi menurut Maswadi (2007:14) :

1. Berlangsungnya secara evolusioner, yakni demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama.
2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif, yakni demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan.
3. proses yang tidak pernah selesai, demokrasi berlangsung terus menerus

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah Negara berdasarkan aspirasi rakyat, atau dapat dikatakan juga sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi sendiri dianggap sebagai

suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak.

Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. Kedua, pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, atau bupati. Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak. Ketiga, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

D. Demokrasi Pancasila di Indonesia

Secara Umum, Pengertian Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercermin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Perkembangan demokrasi pancasila di Indonesia menurut Budiardjo (2010: 127) telah mengalami pasang surut. Pada pokok permasalahan demokrasi di Indonesia ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melakukan pembangunan ekonomi serta pembangunan nasional, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator.

Pada masa 1998-sekarang Indonesia berada dalam masa reformasi. Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman orde baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai setting institusional untuk menghasilkan keputusan politik di mana individu mendapat kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif meraih suara rakyat. Tak jauh beda dengan Schumpeter, Samuel Huntington, mendefinisikan demokrasi sebagai prosedur pemungutan suara yang adil dan berkala untuk memilih pemimpin negara.

Langkah demokratisasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah (pilkada) secara langsung yang juga diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah yang lebih demokratis dengan diberikan hak rakyat untuk menentukan kepala daerah. Termasuk juga di lokasi penelitian ini yakni tentang pilkada kabupaten Serang. Memang benar bahwa demokratisasi adalah sebuah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas.

Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sediki berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Prinsip-prinsip menurut Asshiddiqie (2011:198-234) demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan atau persamaan (Freedom/Equality)

Kebebasan / persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

2. Kedaulatan Rakyat (people's Sovereignty).

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

3. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

- Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif
- Badan kehakiman / peradilan yang bebas dan merdeka

- Pers yang bebas
- Prinsip Negara hukum
- Sistem dwi partai atau multi partai
- Pemilihan umum yang demokratis
- Prinsip mayoritas
- Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas

Dinegara kita, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia. Praktek demokrasi ini tanpa dilandasi mental state yang berakar dari nilai-nilai luhur bangsa merupakan gerakan omong kosong belaka.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima priode:

1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945-1950
2. Pelaksanaan demokrasi masa orde lama terbagi atas:
 - Masa demokrasi liberal 1950-1959.
 - Masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965.
3. Pelaksanaan demokrasi masa orde baru tahun 1966-1998
4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-1999.
5. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang.

E. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum menurut Abu Nashr Muhammad Al-Iman (2004:29) adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.

Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat

untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

1. Hak pilih aktif (hak memilih)
2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyaihak memilih, baru bisa menggunakannya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih (Abdullah, 2009:168)

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

1. tidak terganggu jiwa/ ingatannya
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hakmemilihnya.(Abdullah, 2009:168)

Masalah dan gejala seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat

yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
2. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
3. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

F. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupanberbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan

dan pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepadamasyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Seperti yang diungkap Abdul Asri (Harahap 2005:122), mengatakan bahwa Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnyapilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuatperubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatanrakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi

daridemokrasi yang melekat padapilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.

Pilkada yang oleh banyak pihak dipahami dan dijadikan barometer penyelenggaraan demokrasi di aras lokal tidak luput dari jiwa zaman dunia (*zeitgeist*) yang terus berubah. Realisasi demokrasi di level lokal dengan dilaksanakannya amanat peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bentuk derivasi dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, proses ini membutuhkan perjuangan menuju demokrasi atau disebut juga sebagai demokratisasi

Mekanisme penyelenggaraan pilkada dan pelaksanaan pilkada menjadi suatu kewajiban yang turut dielaborasi agar terbentuk suatu kesadaran bersama atas amanat yang diundangkan dalam peraturan pemerintah. Pilkada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal. Dan juga melalui pilkada peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitas partisipasi rakyat muncul. Dalam PP No. 06 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah menjelaskan pula bahwa legitimasi politik terbesar adalah dari rakyat pemilih.

Penguatan sistem pilkada ini juga terdapat dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah harus dipilih secara langsung

yang koheren dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden (Leo, 2009:27)

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.

G. Pengertian Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakatnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan

rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005 :

”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.”

Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka pada dasarnya pemilihan kepala daerah adalah sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Dan dalam penentuan terpilihnya kepala daerah yang memiliki peranan penting adalah rakyat, dimana tanpa adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat seorang kepala daerah takkan ada. Oleh karena itu seorang kepala yang telah terpilih hendaknya mampu menjalani amanat yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu pemimpin yang dipilih juga hendaknya orang yang benar-benar mampu dalam memimpin daerah yang akan dipimpinya. Oleh karena itu kualitas dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam memimpin suatu daerah.

H. Pemerintahan Daerah

Secara harfiah menurut Zaidan Nawawi (2013:18) istilah pemerintahan atau dalam bahasa inggris adalah pedanan dari kata government. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.

Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia.

Daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeen schappen*) atau yang bersifat belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

I. Tinjauan Tentang Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2011: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk

menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2011: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalaldan Dedi Supriadi (2010: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2011:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warganegara biasa

dibagi menjadi dua yaitu : mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Menurut Miriam Budiharjo (2012:36) “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson dalam Wahyu (2010:24), *no easy choice: political participation in developing contries* mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Tubagus Ali (2012 : 46), mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka”.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warganegara dalam kegiatan politik yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam suatu negara, tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan warga negara dalam mengikuti dan memahami masalah politik serta secara langsung melibatkan diri di dalamnya. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dan sekelompok orang untuk ikut serta

secara aktif dalam kehidupan bernegara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 2003:1). Kegiatan ini mencakup menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau sekelompok kepentingan, mengadakan hubungan atau *contacting* dengan pejabat atau anggota parlemen.

Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum juga merupakan definisi partisipasi politik.

Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Maka secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007 : 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”.

J. Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum melaksanakan pemilihan kepala daerah ada tahapan atau proses yang harus dilaksanakan. Proses merupakan rangkaian berbagai kegiatan dari struktur yang bekerja dalam satu unit kesatuan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Bahwa proses pelaksanaan Pilkada diartikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diberi wewenang memprosesnya mulai dari penetapan pemilih hingga pelantikan kepala daerah.

1. Penetapan Pemilih

Dalam berpartisipasi terhadap pemilihan kepala daerah, masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah menikah, yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir ditambah dengan daftar pemilih tambahan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap sementara untuk pemilihan, dengan memberikan jangka waktu bagi masyarakat untuk melakukan usul atau perbaikan. Dalam jangka waktu tersebut, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya bila terdapat kesalahan. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki disahkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan kelurahan, pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk diketahui oleh masyarakat.

2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan yang telah memenuhi syarat yaitu :

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita proklamasi 17 agustus 1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan /atau sederajat;

- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. Penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan terlebih dahulu adalah adanya persyaratan transparansi.

Penyaringan bakal calon juga harus dilakukan secara transparansi agar tidak adanya pelanggaran hukum. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat mengenal bakal calon yang sudah memiliki kelengkapan persyaratan.

K. Profil Walikota Dan Wakil Walikota

1. Data Pribadi Walikota

NIP LAMA	400.034.997
NIP BARU	19560801 198503 1 007
NAMA LENGKAP	Ir. UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN, MM
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	TEBING TINGGI, 01 AGUSTUS 1956

AGAMA	ISLAM
SUKU	MANDAILING
PANGKAT TERAKHIR	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) / T.M.T 01 APRIL 2010
MASA KERJA	24 TAHUN 05 BULAN
PENDIDIKAN TERAKHIR	PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN USU MEDAN TAHUN 1999
JABATAN SEKARANG	WALIKOTA TEBING TINGGI
MASA KERJA	2017 – 2022

2. Riwayat Pendidikan Walikota

TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
PENDIDIKAN DASAR	-	SD NEGERI TEBING TINGGI	1968
SLTP UMUM	-	SMP NEGERI 3 MEDAN	1971
SLTA UMUM	A.1/ FISIKA	SMA NEGERI 6 MEDAN	1974
SARJANA	TEKNIK SIPIL	USU MEDAN	1983
PASCA SARJANA	MAGISTER MANAGEMENT	USU MEDAN	1999

3. Data Pribadi Wakil Walikota

NAMA LENGKAP	Ir. H. OKI DONI SIREGAR
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KUALA SIMPANG, 29 JANUARI 1969
AGAMA	ISLAM
SUKU	MANDAILING
PENDIDIKAN TERAKHIR	STRATA I FAKULTAS TEKNIK

	JURUSAN SIPIL 1993
JABATAN SEKARANG	WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI
MASA KERJA	2017 - 2022

4. Riwayat Pendidikan Wakil Walikota

TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
PENDIDIKAN DASAR	-	SD NEGERI 2 KUALA SIMPANG	1981
SLTP UMUM	-	SMP NEGERI 1 KUALA SIMPANG	1984
SLTA UMUM	-	SMA NEGERI 1 KUALA SIMPANG	1987
SARJANA	TEKNIK SIPIL	UNIVERSITAS DHARMA AGUNG MEDAN	199
PENDIDIKAN DASAR	-	SD NEGERI 2 KUALA SIMPANG	1981

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Model desain penelitian deskriptif kualitatif pun merupakan desain penelitian yang digunakan untuk makna dalam proses-proses komunikasi linier (satu arah), interaktif maupun pada proses-proses transaksional.

Moleong (2005:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Pendekatan kualitatif dalam komunikasi lebih menekankan pada bagaimana sebuah pendekatan dapat mengungkap makna-makna dari konten komunikasi yang ada sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh berhubungan pemaknaan dari sebuah proses komunikasi (Bungin, 2008:302)

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya,

menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terkait nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Darmadi, 2014:287).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian survey. Penelitian survey menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2009:159) adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Metode penelitian survey adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul (Umar, 2002:42)

Survey merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang ditujukan pada sejumlah individu atau kelompok, jumlahnya *relative* besar, dimana penulis menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku atau aspek sosial lainnya dengan individu atau kelompok yang diteliti haruslah mewakili populasi.

C. Informan atau Narasumber

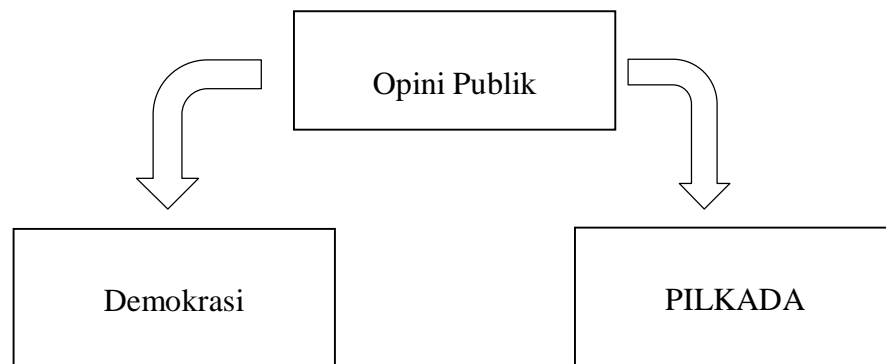
Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu.

- a. Lurah Tambangan Hulu : 1 Orang

b. Tokoh Masyarakat Tambangan Hulu : 1 Orang

c. Masyarakat : 4 orang

D. Kerangka Konsep



Tabel 3.1
Kerangka Konsep

E. Defenisi konsep

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sejumlah konsep dan teori sebagai sarana dalam melakukan pendekatan maupun untuk alat yang akan digunakan dalam proses analisa data.

Beberapa konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Opini Publik (Masyarakat) adalah pernyataan dari sikap, opini public dapat berubah-ubah dalam hal intesitas dan stabilitasnya. Dengan mengacu pada interpretasi dalam bahasa inggris dan perancis terhadap kata opini, Noelle-Neuman menyatakan bahwa opini adalah derajat persetujuan atau kesepakatan dari suatu masyarakat tertentu.

- b. Konsep demokrasi dan demokratisasi yang merupakan dua variabel yang penting untuk dijelaskan secara konseptual dan teoritis terkait penelitian ini, karena penelitian ini yang menekankan pada proses politik berupa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari konsep demokrasi dan demokratisasi. Kedua konsep itu baik demokrasi dan demokratisasi penulis nilai merupakan konsep dasar yang mesti digunakan dalam proses penelitian ini, mengingat tema penelitian yang berbasis pada pemilihan daerah gabungan itu tidak lepas dari proses dan peristiwa politik yang dapat dianalisa melalui pendekatan kedua konsep tersebut.
- c. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bersama. Kedua konsep itu sangat relevan dan merupakan fokus utama dalam penelitian ini, sehingga perspektif terkait pilkada termasuk pilkada langsung dan pilkada bersama juga akan diuraikan sehingga diharapkan nantinya dapat menjelaskan proses penggabungan pilkada bersama antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota. Dalam menjelaskan kedua konsep itu juga akan dibahas tentang proses pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia termasuk menilai dari sisi positif serta negatif dari pelaksanaan proses politik tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer yang di dapat oleh penulis dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung pada objek yang sedang di teliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu.
- b. Observasi, adalah Observasi adalah salah satu teknik pengumpula data dengan cara datang langsung ke tempat objek penelitian.

Sumber data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian di tempat.

G. Teknik Analisis Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka (Mikkelsen, 2003:318). Maleong mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, 2007:163).

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategori sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui

pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Melalui metode kualitatif kita dapat mengenal subyek penelitian secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan defenisi mereka sendiri tentang dunia dan komunikasi yang mereka lakukan. Metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan lainnya akan hilang (Bogdan, 2002:5)

H. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tambangan Hulu Tebing tinggi

Tabel 3.2 Batas Wilayah

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah utara	KELURAHAN TAMBANGAN	KECAMATAN PADANG HILIR
Sebelah selatan	KELURAHAN SATRIA	KECAMATAN PADANG HILIR
Sebelah timur	KELURAHAN TAMBANGAN	KECAMATAN PADANG HILIR
Sebelah barat	ALIRAN SUNGAI PADANG	KECAMATAN RAMBUTAN

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Data Profil Kelurahan

Kelurahan Tambangan Hulu merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan luas administratif 2,3916 km² yang berkembang sebagai permukiman, jasa dan perdagangan. Kelurahan Tambangan Hulu terdiri dari 4 Lingkungan. Adapun batas-batas kelurahan Tambangan Hulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Tambangan

Sebelah Selatan : Kelurahan Damar Sari

Sebelah Barat : Kabupaten Serdang Bedagai

Sebelah Timur : Kelurahan Satria dan Kelurahan Rambung

Peta Penduduk Dalam Lingkup Kelurahan

Jumlah Penduduk : 3.176 Jiwa

Jumlah Penduduk Dewasa : 2.121 jiwa

Jumlah Laki-Laki : 1.569 Jiwa

Jumlah Perempuan : 1.607 Jiwa

Jumlah KK : 744 KK

Jumlah KK Miskin : 365 KK

Jumlah Penduduk Miskin : 1.825 Jiwa

2. Peta Lokasi



B. Penyajian Data

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai opini masyarakat kelurahan Tambangan Hulu terhadap calon tunggal Walikota Tebing Tinggi 2017.

Proses pengolahan data adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil jawaban dari wawancara dan juga dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan peneliti ke lokasi penelitian.

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data-data dari hasil wawancara kepada narasumber dan hasil pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan, peneliti kemudian melakukan tindakan analisa terhadap data-data yang diberikan.

C. Pembahasan

Data dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sumber. Dari hasil wawancara kepada narasumber tersebut dianalisa dan kemudian dibuat pembahasan dan dijadikan dalam beberapa poin.

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yakni:

1. Buyung Damanik sebagai Lurah Tambangan Hulu
2. Safari Rajab sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Tambangan Hulu
3. 4 orang masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu dari berbagai lapisan;
 - Melly Rahmayanti Harahap (Pegawai Negri Sipil, 39 tahun)
 - Grace Damayanti (Mahasiswa, 19 tahun)
 - Ari Irwanda (Guru, 23 tahun)
 - Syamsidi (Wiraswasta, 60 tahun)

a. Pengetahuan mengenai PILKADA

Pada hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.

Menurut Bapak Buyung Damanik sebagai Kepala Lurah Tambangan Hulu menyatakan bahwa:

“Pilkada ini selalu berkaitan dengan pemimpin daerah. Kepanjangan dari pilkada sendiri adalah pemilihan kepala daerah. Seperti kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki Pemimpin. Seperti Gubernur, Bupati dan wali kota. Mengingat hal itu maka dilakukanlah pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan maksud mengangkat pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilihan inilah yang biasa disebut sebagai pilkada. Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat.” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018)

Sementara itu para masyarakat mengutarakan bahwa PILKADA merupakan bentuk dari kegiatan demokrasi untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Hal ini seperti diungkapkan oleh bapak Syamsidi bahwa:

“PILKADA itu ibaratnya pemilu tapi lebih kecil, ya tujuannya untuk memilih pemimpin daerah contohnya seperti gubernur, walikota. Ini hanya bisa dilakukan di negara yang menganut paham demokrasi” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut makna dari pilkada sendiri terbagi atas 3, yakni; *pertama* adalah Perspektif tujuan. Pilkada dimaksudkan sebagai pemindahan konflik. Pemindahan dari masyarakat kepada perwakilan politik dengan tujuan menjamin integrasi masyarakat. *kedua* adalah Perspektif tingkat perkembangan negara. Pilkada diadakan sebagai alat untuk membenarkan rezim

yang berkuasa. *Ketiga* adalah Perspektif demokrasi liberal. Pilkada merupakan upaya meyakinkan serta melibatkan individu dalam setiap proses politik.

Sebagai sarana partisipasi politik rakyat, pilkada seharusnya mampu berfungsimerupakan pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik rakyatsehingga tercipta kondisi negara yang benar-benar demokratis. Walaupuntidak dapat dipungkiri bahwa banyak indikator yang dapat mempengaruhi pemilihan walikota, seperti faktor-faktor sosiologi yang didalamnya terdapat peran orang tua dan teman-teman sepermainan, karenatidak dapat dipungkiri bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai perananbesar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Lalu faktorrasionalitas yaitu apakah mereka memilih karena didukung oleh pengetahuanmereka tentang program partai baik langsung maupun melalui media, ataupun kandidat yang akan mereka pilih, dan juga adanya pengaruh psikologis dalam diri pemilih, salah satu konsep psikologis sosial yang digunakan untuk menjelaskan partisipasi untuk memilih pada pemilu kada berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada presepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Faktor psikologislainnya yang dapat dipertimbangkan adalah ketokohan, yaitu seseorang pemilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung di atasnya

b. Pilkada dengan Calon Tunggal

Polemik pemilihan dengan calon tunggal telah diselesaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Apabila pemilihan ditunda sampai pemilihan berikut, akan merugikan hak konstitusional warga

negara untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon.

Menurut MK, pemilihan dengan calon tunggal harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah diusahakan menemukan paling sedikit dua pasangan. Manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat menentukan pilihan setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal tersebut, bukan dengan pasangan calon kotak kosong.

Calon tunggal sah terpilih jika rakyat lebih memilih setuju. Apabila suara rakyat lebih banyak tidak setuju, maka ditunda sampai pemilihan serentak berikutnya. Penundaan tidak bertentangan dengan konstitusi, sebab rakyat telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara tidak setuju. Mekanisme demikian dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan menang secara aklamasi tanpa meminta pendapat rakyat.

Semua narasumber dalam penelitian ini mengutarakan hal yang hampir serupa bahwa mereka mengetahui bahwa pada Pilkada 15 Februari 2017 tersebut hanya memiliki satu pasangan calon. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Safari Rajab sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Tambangan Hulu menyatakan:

“Iya saya tahu mengenai Pilkada kemarin hanya diikuti oleh satu pasangan saja, saya pikir hampir semua masyarakat Tebing Tinggi ini juga mengetahuinya, pasangan calon itu adalah Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni. Menurut saya hal tersebut sah-sah saja dilakukan, karena jika dibatalkan karena hanya ada satu calon saja, maka akan berdampak kerugian yang lebih besar. akan banyak

sekali kerugian diberbagai bidang. Jadi jika asangan tersebut sudah lulus tes kelayakan dan setelah itu jumlah suarapun mencukupi ya tidak ada salahnya untuk diberi kesempatan memimpin kota Tebing Tinggi ini” (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018)

Menurut penuturan masyarakat mengenai pilkada di tebing tinggi yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja membuat pilkada pada masa itu (15 Februari 2017) tidak meriah. Masyarakat juga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa pasangan calon ini (Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni) tidak melakukan kampanye akbar, hanya sekedar saja. Hal ini seperti diutarakan oleh Bapak Ari Irwanda yang menyatakan bahwa:

“Memang pilkada di sini beda, karena cuma satu pasangan calon. Bahkan, kampanyenya enggak ada. Jadi, kampanye hanya sekadarnya. Sehingga, seperti bukan pilkada, Meski tak ada kampanye akbar, katanya, pasangan calon tersebut kerap melakukan berbagai kegiatan. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat. Pada masa kampanye, beliau menghadiri pelantikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muda Kota Tebingtinggi, mendatangi bank sampah, dan teranyar menghadiri kegiatan kelompok usaha bersama.” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018)

Mengenai pasangan calon walikota tunggal ini memang tidak mengadakan kampanye akbar, tetapi tentunya juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan visi dan misi mereka dalam memimpin kota ini. Seperti yang diutarakan oleh ibu Melly Rahmayanti Harahap bahwa:

“Meski pada waktu itu tidak ada kampanye akbar, tetapi pasangan calon ini ini (Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni) tetap melakukan pendekatan-pendekatan di berbagai kalangan, contohnya menghadiri acara-acara organisasi kemasyarakatan, menghadiri kegiatan amal dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dengan keberadaan media massa sekarang ini tentunya membantu mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon tersebut.” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2018)

Pada waktu itu Calon walikota dan wakil walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar memaparkan visi misi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tebing Tinggi tahun 2017 disebarkan di media cetak dan media elektronik lainnya. Pemaparan visi misi ini merupakan moment paling penting bagi pasangan calon, khususnya bagi masyarakat kota Tebing Tinggi untuk mendengarkan secara langsung dan menentukan masa depannya lima tahun ke depan.

Pemanfaatan media dalam bentuk apapun merupakan saluran komunikasi kandidat kepada pemilih dapat dianggap efektif dan efisien pada masa kampanye. Berkampanye melalui media merupakan hal yang biasa dalam dunia politik modern. Penggunaan media dalam komunikasi politik saat kampanye sangat penting. Kecermatan memilih media kampanye harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi khalayak.

Pendekatan secara langsung dengan pemilih merupakan strategi mencari dukungan kandidat ke masing-masing individu. Pendekatan personal dengan pemilih sering disebut dengan kampanye tatap muka. Strategi ini

dianggap efektif walaupun tidak dapat mencakup area yang luas, namun tidak semua tempat dan kalangan pemilih berhasil ditemui saat melakukan kampanye tatap muka.

Penggunaan media massa dalam kampanye merupakan salah satu saluran komunikasi kandidat kepada pemilih dan cakupan daerah yang lebih luas. Dalam kampanye modern penggunaan media massa kerap dilakukan sebagai strategi pembentukan citra konstestan. Penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa disebut *pull marketing* (Nursal, 2004:45). Karena strategi *pull marketing* merupakan strategi politik yang lebih menitik beratkan pada pembentukan image politik yang positif.

Faktor geografis dan kecilnya wilayah pemilihan di Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu alasan kuat bagi kandidat untuk tetap menggunakan media luar ruang dalam kampanye politik untuk membentuk image. Media kampanye seperti baliho dan spanduk yang bergambarkan pasangan kandidat dianggap lebih efisien, karena dapat secara langsung didistribusikan hingga daerah pemilihan terkecil. Alasan penggunaan media tersebut lebih didasari oleh lokasi pemilihan kota Tebing Tinggi yang hanya memiliki 5 kecamatan dan dengan mempertimbangkan efektifitas media dan penghematan biaya kampanye.

Menurut Grace Damai Yanti seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta menyatakan bahwa info program-program yang disampaikan oleh calon tunggal pada saat itu (Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni) diperolehnya selain dari media cetak dan elektronik juga diperolehnya dengan melihat selebaran

dan baliho. Menurutnya program pasangan calon kepala daerah pada saat itu sudah dinilai baik:

“Menurut saya program pasangan calon kepala daerah pada saat itu (Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni) sudah cukup baik, contohnya saja program mereka adalah mengalihkan layanan masyarakat ke komputerisasi, dan menjadikan kota tebing tinggi menjadi kota yang lebih baik lagi.” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018)

Dalam Visi pembagunannya Umar Zunaidi Hasibuan berjanji akan "Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi yang Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dalam Kebhinnekaan. Namun sadar akan luas daerahnya yang hanya 0,05% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara serta Sumber Daya Alam (SDA) yang minim, sembari menggali potensi-potensi daerah Beliau melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pembangunan.

Adapun program unggulan yang dijalankan yakni menyukseskan program pendidikan wajib belajar 12 tahun, dengan program ini harapannya ke depan di Tebingtinggi tidak ada lagi ditemukan anak orang miskin yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tuanya. Selanjutnya, untuk menunjang pendidikan wali kota telah mengeluarkan Perwa wajib belajar malam hari dari mulai pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB, juga diberikan bea siswa kepada para mahasiswa dengan indeks prestasi mencapai nilai 3,0. Untuk pelajar tingkat SMA, SMK, SMP dan SD dengan bantuan siswa miskin (BSM).

Bidang sosial, melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipemerintahannya memprogramkan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan data PPLS tahun 2011 Jumlah Tangga Miskin Kota Tebingtinggi 8.297 RT. Sejalan dengan itu Pemko Tebingtinggi melaksanakan upaya yang berkesinambungan dan bertahap dan membantu masyarakat miskin untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni berupa atap, lantai dan dinding (Aladin).

Penanganan masalah banjir kiriman baik dari Sungai Padang maupun Sungai Bahilang yang selalu dicemaskan masyarakat Tebingtinggi, pengendaliannya dilakukan dengan melakukan pembangunan bendung dam bergerak Bajayu (Batak, Jawa dan Melayu). Dalam hal ini Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi telah berhasil mendorong pihak Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengucurkan anggaran pada tahun 2014 untuk membangun dam bergerak Bajayu yang berlokasi Sungai Padang di Kelurahan Tambangan Hilir Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi senilai Rp230 miliar dengan sistem pembangunan multi years (bertahap).

Bendungan Bajayu dengan lokasi khusus bendungan seluas 45 hektar, selain dapat mengendalikan banjir di Kota Tebingtinggi, manfaat dari bendungan ini juga nantinya akan mampu mengairi lahan total seluas 7.558 hektar. Masing-masing areal Bajayu 4 ribu hektar, Paya Lombang 1.588 hektar dan Langau seluas 2.000 hektar.

c. Penilaian Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Tebing Tinggi Terpilih

Tentunya banyak indikator untuk menilai kepala daerah yang baik saat mereka mengemban amanah masyarakat daerahnya. Salah satunya dengan melihat sisi inovasinya dalam membangun daerah, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pariwisata, perdagangan, maupun investasi.

Dalam menilai kinerja kepala daerah terpilih tersebut (Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni) dinilai oleh masyarakat sudah baik, seperti yang diutarakan oleh Bapak Syamsidi sebagai berikut:

“Jika menilai kerja Bapak Walikota dan wakilnya dalam membangun kota ini, tentunya secara awam saya menilai beliau sudah berusaha dengan cukup baik membangun sara dan prasarana kota. Pembangunan rumah ibadah, santunan kepada anak yatim dan korban bencana juga dilakukan. Perbaikan untuk memberikan kesempurnaan pelayanan masyarakat juga dilakukan.” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018)

Hasil upaya dan kerja nyatanya di 3 tahun 8 bulan kepemimpinannya di Kota Tebingtinggi pembangunan yang dijanjikan dalam visinya sedikit demi sedikit mulai nyata kelihatan. Hal tersebut bisa kita lihat dari APBD dan PAD Tebingtinggi sejak kepemimpinannya grafiknya naik positif, tahun 2011 APBD Tebingtinggi Rp 488.186 miliar sedangkan PAD ditargetkan Rp 28.590 miliar terealisasi Rp 32.738 miliar. Tahun 2012 APBD Tebingtinggi naik menjadi Rp 521.150 miliar sedangkan PAD ditargetkan Rp 36.321 miliar terealisasi Rp 47.330 miliar. Tahun 2014 APBD Tebingtinggi mengalami kenaikan menjadi Rp

624.621 miliar sedangkan PAD ditargetkan Rp 65.945 miliar terealisasi Rp 74.515 miliar dan Tahun 2015 APBD Tebingtinggi ditargetkan Rp 621,985 miliar.

Untuk mewujudkan visinya agar masyarakat Tebing Tinggi Beriman dan Bertaqwa sesuai kepercayaan masing-masing di bidang keagamaan Umar Zunaidi melakukan pembimbingan dan pengayoman keagamaan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakatnya yang kondusif serta religius. Program pertamanya menggalakkan gemar mengaji kepada para pemuda-pemudi selepas sholat Magrib, hal ini untuk menjauhkan anak-anak muda Kota Tebingtinggi dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan mengajari mereka untuk bisa membaca dan mengenal Alquran secara dini. Dan untuk Nasrani Pemko Tebingtinggi tahun 2015 telah menampung anggaran honor guru sekolah minggu di APBD.

Selain itu, melihat letak geografis Tebing Tinggi sebagai kota jasa yang posisinya berada di perlintasan jalur segitiga menuju Kota Medan, Siantar (pintu masuk ke Danau Toba), dan menuju Kisaran (pintu masuk pelabuhan internasional Kuala Tanjung dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke) Umar Zunaidi Hasibuan melakukan terobosan pembangunan Masjid Agung di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi yang kapasitasnya bisa menampung 5.000 jamaah.

Umar Zunaidi juga menilai bahwa masalah pendidikan sangat penting, maka untuk urusan pendidikan sesuai apa yang diamanatkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 49, dialokasikan dana 20%

dari jumlah APBD, pada Anggaran 2014 anggaran urusan pendidikan dari APBD ditampung 33,20 persen.

Sumber data: (<http://hariansib.co/view/Opini/57259/3-Tahun-8-Bulan-Umar-Zunaidi-Hasibuan-Berjibaku-Membangun-Kota-Tebingtinggi.html>)

Menjadi pemimpin sebetulnya tidak sekadar harus memimpin orang lain. Walaupun kedengarannya begitu mudah, namun menjadi pemimpin itu memang sulit untuk dijalani. Menjadi pemimpin yang baik, sederhananya adalah ketika Anda menjadi pemimpin yang dicintai oleh para pengikut.

Sebenarnya, seperti apakah pemimpin ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ada begitu banyak contoh para pemimpin di dunia ini, namun kita harus melihat tidak hanya secara gambaran umum. Jika berbicara mengenai perspektif pandangan secara personal, tentu akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Mencari jawaban mengenai pemimpin yang ideal di tengah masyarakat sebetulnya malahan membutuhkan mata kita tentang esensi dari sebuah kepemimpinan itu sendiri. Kita perlu berhenti sejenak dan memandang pemimpin sebagai tipe orang yang bertanggung jawab atas sebuah kelompok.

Menurut Bapak Buyung Damanik sebagai Kepala Lurah Tambangan Hulu menyatakan bahwa:

“Pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan nasehat dari orang-orang di sekitarnya. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, kepada organisasinya. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan,

harus pandai, cakap dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.” (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 juli 2018)

Menurut Ibu Melly Rahmayanti Harahap ketika mengutarakan kriteria pemimpin yang baik adalah :

“Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut saya pemimpin itu harus memiliki sikap jujur, mampu mengatasi masalah, baik dalam bersosialisasi, tegas dan selalu bersikap positif.” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2018)

Kepaladaerah memiliki peran penting dalam melakukan terobosan-terobosan dalam membangun daerahnya melalui inovasi–inovasi daerah. Apalagi pada era otonomi daerah dituntut kemandirian bagi daerah untuk membangun daerahnya. Kepemimpinan merupakan fokus dari kelompok, sehingga pemimpin merupakan subjek yang memotori suatu kelompok. Pemimpin menjadi pusat perhatian dan segala sumber yang menentukan segala sesuatu dari kelompok tersebut. Oleh karena itu seringkali pusat perhatian kelompok akan tertuju kepada pemimpin.

Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, tentunya setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang digunakan dalam memimpin daerahnya. Penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat yang ada di daerah. Karena

setiap gaya kepemimpinan berdampak pada system penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Bapak Buyung Damanik sebagai Kepala Lurah Tambangan Hulu menyatakan bahwa:

“Gaya kepemimpinan Bapak Walikota dan Wakilnya tersebut (Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni) bisa dimasukkan sebagai kepemimpinan demokratis contohnya yaitu dalam proses kepemimpinan mereka mau langsung terjun langsung kelokasi untuk melihat bagaimana kondisi daerahnya kemudian ketika ada permasalahan yang harus di selesaikan beliau langsung mengkordinasikan kepada pihak yang terkait dan meminta masukan-masukan untuk selanjutnya mendapatkan pemecahan masalah yang tepat.” (hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pemilihan dengan calon tunggal telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Apabila pemilihan ditunda sampai pemilihan berikut, akan merugikan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon.
2. Calon tunggal sah terpilih jika rakyat lebih memilih setuju. Apabila suara rakyat lebih banyak tidak setuju, maka ditunda sampai pemilihan serentak berikutnya. Penundaan tidak bertentangan dengan konstitusi, sebab rakyat telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara tidak setuju. Mekanisme demikian dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan menang secara aklamasi tanpa meminta pendapat rakyat.
3. Masyarakat Tebing Tinggi mengenal pasangan calon walikota dan wakilnya dengan cukup baik. Hal ini diungkapkan dengan pahamnya para narasumber dengan program-program yang dijanjikan oleh pasangan Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni.
4. Menurut para narasumber Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni telah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya

perubahan dan perbaikan oleh Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni dalam tujuannya membangun kota Tebing Tinggi menjadi kota yang lebih baik lagi

5. Menurut hasil wawancara kepada narasumber dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan Bapak Umar Zunaidi dan Bapak Oki Doni sebagai kepemimpinan demokratis contohnya yaitu dalam proses kepemimpinan mereka mau langsung terjun langsung kelokasi untuk melihat bagaimana kondisi daerahnya kemudian ketika ada permasalahan yang harus di selesaikan beliau langsung mengkoordinasikan kepada pihak yang terkait dan meminta masukan-masukan untuk selanjutnya mendapatkan pemecahan masalah yang tepat.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader parpol
2. Diharapkan kepada KPU juga menggunakan media elektronik dan media cetak dengan fungsi yang maksimal untuk mensosialisasikan mengenai pesta demokrasi seperti pemilu dan pilkada
3. Diharapkan untuk masyarakat kota Tebing Tinggi untuk peka dan juga berperan aktif dalam mengikuti Pemilu dan Pilkada dengan ikut

memberikan suaranya tidak memilih untuk menjadi golongan putih (Golput)

4. Diharapkan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi tidak menjual suaranya dengan memilih pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul AsriHarahap,2005 *ManajemendanResolusiKonflikPemilukada*, Jakarta: PT Pustaka. Cidesindo
- Abdullah, Rozali, S.H. Prof. H.2009, *MewujudkanPemilu yang LebihBerkualitas (PemiluLegislatif)*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta
- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004*MembongkarDosa-dosaPemilu*, Prisma Media, Jakarta
- Astrid, S. Soesanto. 2000. *KomunikasiSosial di Indonesia*. BinaCipta, Jakarta.
- Ali, Tubagus Haedar.2012. *Prinsip-prinsip Network Planning*. Gramedia, Bandung.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-DasarIlmuPolitik*. GramediaPustakaUtama: Jakarta
- Bogdan, R.Cdan Taylor. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Djalal, Fasli dan Supriyadi, Dedi. 2010. *Reformai Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*: Adicita. Yogyakarta
- Eko Hari Susanto, 2014, *Komunukasi Manusia Esensi dan Iplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- JalaluddinRakhmat, 2005, *KomunikatorPesandan Media*, PT RemajaRosdakarya. : Bandung
- Jalaludin, Rakhmad2004 *,MetodePenelitianKomunikasi*, RemajaRosdakarya, Bandung
- Jimly Asshiddiqie2011, *Hukum Tata Negara &Pilar-PilarDemokrasi*,SinarGrafika,Jakarta,
- Leo agustino, 2009. *Pilkada Dan DinamikaPolitikLokal*,:PustakaPelajar, Yogyakarta
- Kantaprawira, Rusadi, 2003. *SistemPolitik di Indonesia*, SinarBaru, Bandung
- Maran , Rafael Raga. 2007. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* : Rineka Cipta. Jakarta

- MasriSingarimbundanSofian Effendi, 2009, *MetodePenelitianSurvai*, LP3ES, Jakarta
- Maswadi. 2007. *Demokratisasi*. GramediaPustaka. Jakarta
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2010. *Dasar-dasarilmupolitik*, PT. GramediaPustakaUtama, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2007, *MetodologiPenelitianKualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung
- Nimmo, Dan. 2000. *KomunikasiPolitik (Komunikator, Pesan, dan Media)*.Terjemahan: TjunSurjaman. Cetakan III, RemadjaRosdakarya, Bandung.
- RachmatKriyantono, 2007, *TeknikPraktisRisetKomunikasi*: disertaicontohRiset Media, Public Relations, KomunikasiPemasarandanOrganisasi, Jakarta: KencanaPrenada Media
- Riduwan, 2004, *StatistikaUntukLembaga&InstitusiPemerintah / Swasta, Bandung*:Alfabeta Bandung
- Siti irene, Astuti Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* : Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2001 *MetodologiPenelitianAdministrasi*. Alfabeta : Bandung
- Sumarno, A.P. 2009. *Dimensi-DimensiKomunikasiPolitik*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Umar, Husein,2002,*MetodeRisetKomunikasiorganisasi*, Jakarta : PT GramediaPustakaUtama,
- Usman,HusainidanSetiady, Purnomo Akbar, 2008, *MetodologiPenelitianSosial*, Jakarta: BumiAksara
- Varma, S.P. 2005. *TeoriPolitik Modern*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Wahyu, 2012, *PartisipasiPolitik Di Negara Berkembang*. RinekaCipta: Jakarta
- ZaidanNawawi,2013, *ManajemenPemerintahan*,:RajawaliPersJakarta

LAMPIRAN



Dokumentasi 1



Dokumentasi 2



Dokumentasi 3

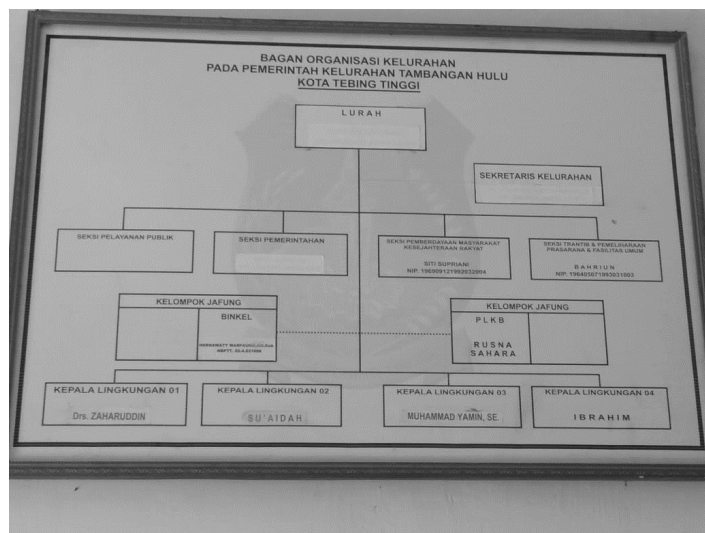


Dokumentasi 4

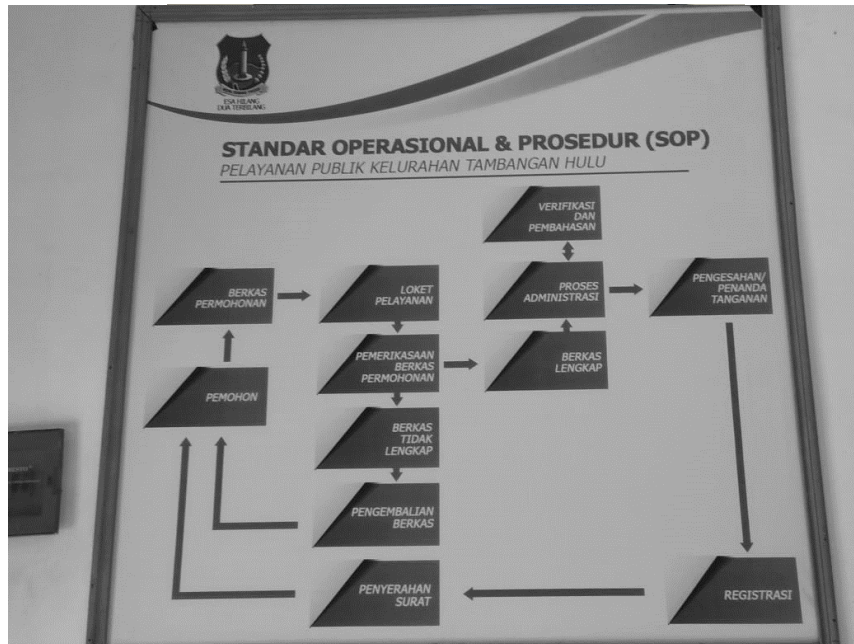
Lampiran II – Kelurahan Tambangan Hulu



Visi & Misi Kelurahan



Struktur Organisasi Kelurahan



SOP Kelurahan